

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN  
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Irsal Ghaffar**

**NIM. C03216019**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irsal Ghaffar

NIM : C03216019

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Irsal Ghaffar

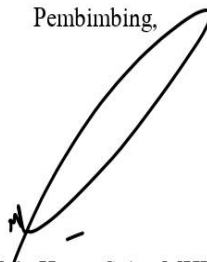
NIM. C03216019

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irsal Ghaffar NIM C03216019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Mei 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts from the bottom left and curves upwards and to the right, ending with a small horizontal stroke.

Moh. Hatta, S.Ag. MHI

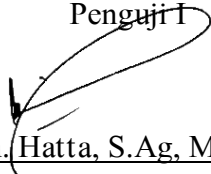
NIP. 197110262007011012

## PENGESAHAN

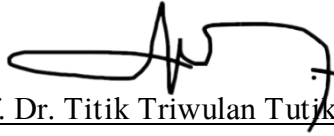
Skripsi yang ditulis oleh Irsal Ghaffar NIM. C03216019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 08 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
Moh. Hatta, S.Ag, MHI  
NIP. 197110262007011012

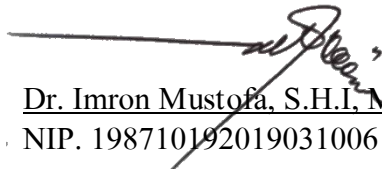
Penguji II

  
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH  
NIP. 196803292000032001

Penguji III

  
Sukanto, SH, MS  
NIP. 196003121999031001

Penguji IV

  
Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud  
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 18 Oktober 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irsal Ghaffar  
NIM : C03216019  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [irsalbilly81@gmail.com](mailto:irsalbilly81@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan  
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Oktober 2021

Penulis

  
(Irsal Ghaffar)



















rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, di ancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah. Dalam Perma No 02 tahun 2012 telah menjelaskan tentang pencurian ringan atau pencurian dengan nominal tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (2.500.000.00) termasuk pencurian ringan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan atau dengan denda yang tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (2.500.000.00). Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Umumnya masyarakat tidak seberapa memahami bagaimana prosedur jalannya perkara pidana mulai dari proses penangkapan sampai bisa masuk ke pengadilan, lembaga mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut

agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkaraperkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara. Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai

tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut.

Bahwa angka Rp250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).













Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang atau akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya adalah :

1. Dalam skripsi yang disusun oleh Pebrina Villa Saputra, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan nomor: 544/Pid.B/2018/PN.Sda”. fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 362 KUHP pada tindak pidana pencurian pada putusan nomor: 544/Pid.B/2018/PN.Sda yang di tinjau menurut hukum pidana Islam.<sup>14</sup>

Pembahasan penelitian dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pencurian ringan putusan pengadilan negeri Hunimoo Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth memiliki perbedaan pembahasan dengan judul di atas. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim terhadap

---

<sup>14</sup>Pebrina Villa Saputra, “ *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan nomor: 544/Pid.B/2018/PN.Sda*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 8







































Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Barang yang diperkenankan untuk dirampas dijelaskan dalam pasal 39 kuhp, yaitu :

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
  - 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumental delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.
3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan pada pasal: 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Dalam tindak pidana pencurian ringan dikenakan pidana kurungan atau denda. Dalam KUHP dan Perma No 02 tahun 2012 dijelaskan bahwa maksimal hukuman terhadap pencurian ringan adalah tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp 2.500.000.00.































yang dilarang oleh agama maupun negara.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan salah satu metode yang sangat ampuh untuk mengantisipasi akan *jarimah*, karena setiap seseorang hendak sebelum melakukan suatu *jarimah*, mereka akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui segala perbuatannya dan hukuman yang akan menimpa dirinya atas perbuatan tersebut, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain maupun tidak. Demikian juga mereka dapat ditangkap dan diproses oleh penguasa negara yang kemudian dijatuhi hukuman di dunia, namun pada akhirnya mereka tidak selalu akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat bila tidak ada kemauan bertobat setelah melakukan kesalahan. Dalam Syariat Islam saat menjatuhkan sebuah hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang lebih baik dan saling toleransi antar sesama masyarakat yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama masyarakat saat bersosial dengan mengetahui batasan-batasan hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu peristiwa *jarimah* adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam sebuah kehidupan dan menghapuskan rasa yang ber-keadilan serta membangkitkan dampak keresahan dalam masyarakat terhadap pembuat yang mereka lakukan.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan bentuk sikap reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap segala macam bentuk perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya

























Oleh karena pidana yang dilakukan pelaku termasuk dalam pencurian ringan, maka acara pidana yang dilakukan menggunakan acara pidana cepat. Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur:

- a. Terdakwa mengakui Dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi:

Berdasarkan keterangan para saksi, dengan keterangan bahwa pada hari senin tanggal 11 maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIT di jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, terdakwa (Iksan Kaimudin) telah mengambil sebuah speaker berwarna hitam dan menjualnya seharga Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap perkara yang dalam hal ini diduga





















yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara. Hakim dalam menjatuhkan hukuman seharusnya memperhatikan banyak hal sebelum menjatuhkan hukuman, misalnya fakta-fakta yang tersungkap di dalam persidangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perihal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjatuhkan hukuman hakim harus memperhatikan hukum secara materil atau asas legalitas.

Menurut Hans Skelsen ada syarat mutlak yang termasuk dalam asas legalitas *nullum crimen* Yang artinya tidak ada perbuatan pidana tidak ada hukuman pidana tanpa undang-undang atau aturan yang mengatur peristiwa tersebut sebelumnya rumusan perbuatan pidana harus jelas agar tidak bersifat *multitafsir* sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ketika Hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya Hakim melakukan proses dengan membenturkan antara fakta dan aturannya. Aturan ini dibangun oleh unsur-unsur perbuatan dilakukan terdakwa yang didakwahkan oleh jaksa penuntut umum sanksi yang paling tepat yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa menurut pasal 364 KUHP *Jo* Perma Nomor 2 tahun 2012 seharusnya sanksi tersebut tidak dengan pidana penjara melainkan pidana denda sesuai dengan pasal tersebut.

Berikut beberapa contoh kasus pencurian ringan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor: (3/Pid.C/2019/PN.Ngw) dengan terdakwa SITI FATONAH Binti MUHAMAD SOLEH Yang didakwa dengan pasal 364 KUHP *Jo* Perma nomor 2 tahun 2012 Yang

diputus dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan

2. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor: (22/Pid.C/2018/PN.Klk) dengan terdakwa AHMAD alias ADIL Bin Pandi yang di dakwah dengan pasal 364 KUHP *Jo* Perma nomor 2 tahun 2012 yang diputus dengan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (Sepuluh) hari dengan pasal 364 KUHP Yang diputus dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Berdasarkan pemaparan kronologi beserta amar putusan pengadilan yang telah kami angkat dalam analisis skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa Iksan kaimudin dalam kasus ini kurang tepat apabila dibenturkan dengan muatan diksi yuridis Perma No 12 tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian ringan karena seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara pada terdakwa karna hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang cukup dijatuhkan hukuman berupa tindak pidana denda ganti rugi sesuai harga nominal barang yang telah dicuri.





























